

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Persoalan migrasi internasional merupakan aspek yang meningkat seiring berkembangnya globalisasi. Isu pekerja migran merupakan hal yang krusial untuk dikaji dalam isu migrasi internasional. Salah satu negara yang memanfaatkan migrasi internasionalnya untuk mendorong produktifitas ialah Jepang. Dengan memanfaatkan pekerja migran asing dapat mendorong kemajuan di Jepang meskipun kondisi geografi atas pekerja lokal yang kurang memadai. Klasifikasi pekerja asing sebelum tahun 1985 memiliki standar kualifikasi khusus sehingga mendorong pekerja asing untuk memiliki keterampilan, namun kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara pekerja asing dengan pekerja asli Jepang karena pekerja asing menerima gaji yang lebih banyak dibandingkan dengan gaji pekerja asli Jepang. Berdasarkan hal tersebut munculah pemikiran untuk menerima pekerja asing yang tidak terampil. Pemikiran tersebut kemudian dapat terealisasi karena Perjanjian Plaza September 1985 yang secara signifikan menyebabkan jumlah pekerja asing meningkat dengan cepat (Muto, 1993).

Berdasarkan sejarahnya, kehadiran pekerja yang tidak memiliki keterampilan selalu menjadi perdebatan besar di Jepang. Sebelum tahun 1985 kebanyakan TKI yang bekerja di Jepang hanya diterima dalam jumlah yang sedikit. Melalui proses seleksi yang ketat, TKI yang bekerja memiliki kualitas yang telah diukur berdasarkan keterampilan yang dimiliki serta pemahaman atas dunia bisnis budaya di Jepang. Kedatangan pekerja migran yang memiliki keterampilan tersebut banyak dimanfaatkan oleh perusahaan besar Jepang sebagai pihak representatif perusahaan dalam menunjang keperluan internasional karena cakap dalam penggunaan multi bahasa (Muto, 1993). Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan rela untuk membayar gaji yang besar bahkan lebih dari pekerja lokal.

Standar pekerja lokal yang dianggap rendah ini menyebabkan demo besar-besaran dari serikat pekerja lokal Jepang yang keberatan untuk menerima pekerja

migran. Hal tersebut memicu persaingan antara pekerja lokal dan pekerja migran dan kecenderungan perusahaan besar untuk lebih mengandalkan pekerja migran. Berdasarkan hal tersebut mulailah timbul pemikiran bahwa Jepang merupakan negara yang homogen dan tidak dapat menghargai perbedaan terutama dari kehadiran pekerja migran (Muto, 1993). Umumnya pekerja lokal pada usia produktif hanya tertarik untuk bekerja di perusahaan besar dibandingkan dengan UMKM. Kondisi tersebut dipicu karena pemahaman dari pekerja lokal Jepang untuk menghindari pekerjaan yang tergolong 3K. Namun semua itu berubah semenjak Perjanjian September 1985 yang menyebabkan kemudahan untuk membangun bisnis di Jepang karena nilai mata uang Yen yang meningkat di mata internasional sehingga memicu pertumbuhan UMKM yang cukup pesat (Muto, 1993).

Perjanjian Plaza September 1985 menjadi peristiwa yang bersejarah bagi Jepang karena mata uang Yen Jepang mengalami apresiasi. Hal tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat di Jepang sehingga menjadi sinyal yang baik bagi para migran untuk bekerja di Jepang. Pertumbuhan ekonomi tersebut memicu peningkatan permintaan atas tenaga kerja buruh atau pekerja tidak terampil semakin tinggi. Kekurangan buruh atau pekerja kerah biru menjadi alasan mengapa Jepang membuka penerimaan pekerja asing tidak terampil karena pekerjaan tersebut umumnya tidak diminati oleh pekerja asli Jepang karena dianggap pekerjaan yang rendah (Nagy, 2008). Kondisi tersebut mendorong kedatangan pekerja asing baik secara legal maupun ilegal ke Jepang karena kemudahan mendapatkan uang di Jepang.

Setelah tahun 1985 hambatan untuk menerima pekerja migran yang tidak memiliki keterampilan telah hilang. Penerimaan pekerja asing yang tidak terqualifikasi nyatanya menjadi masalah baru bagi Jepang sehingga kasus kekerasan pekerja asing di Jepang marak terjadi karena pekerja asing yang berangkat ke Jepang tidak memiliki pengetahuan tentang budaya Jepang (Muto, 1993). Selain itu juga, tingkat kejahatan di Jepang semakin meningkat yang diduga karena masuknya pekerja asing ilegal (Nagy,

2008). Banyaknya pekerja asing ilegal yang masuk ke Jepang juga menyebabkan ketidakstabilan kondisi sosial yang melunturkan nilai budaya Jepang.

Kedatangan pekerja dari negara berkembang secara besar-besaran ke Jepang terjadi pada tahun 1989. Berbagai kelompok pekerja yang datang kebanyakan merupakan pekerja yang secara ilegal meninggalkan negaranya demi melakukan migrasi ke Jepang. Terbukanya jalur migrasi ini mendatangkan pekerja tidak terampil atau disebut *hijukuren rodo* yang tergolong pekerja yang rendah. Umumnya, perusahaan kecil di Jepang yang mempekerjakan mereka sebagai pekerja sementara. Lebih dari 100.000 ekspansi tenaga kerja asing secara ilegal di dominasi oleh negara Asia (Yamanaka, 1993). Reformasi yang terjadi tahun 1989 di Jepang memicu gelombang migrasi yang kuat sehingga dapat mengganggu homogenitas kehidupan sosial Jepang.

Oleh karena itu, terjadi perselisihan perihal membuka ataupun menutup penerimaan pekerja asing. Permasalahan Demografi telah menghambat pembangunan di Jepang. Keharusan menerima pekerja asing disebabkan karena banyak industri kecil di Jepang kekurangan tenaga kerja sehingga menghambat operasional perusahaan. Pentingnya kontrol atas migrasi di Jepang melalui pendataan pekerja asing dapat menjadi cara yang efektif untuk mengukur ekspansi tenaga kerja asing yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, menurut Takamichi Kajita (1995) terdapat 5 kategori pekerjaan tenaga asing di Jepang pada tahun 1991 setelah reformasi, yakni (Kajita, 1995):

1. *Nikkeijin*, merupakan pekerja yang dapat bekerja berdasarkan keterampilan khusus dan berjumlah 27.500 orang;
2. Pekerja pelatihan perusahaan, merupakan calon tenaga kerja yang sedang mengikuti program pelatihan dan berjumlah 43.600 orang;
3. Siswa/i, merupakan pelajar yang mendapatkan izin untuk bekerja di Jepang selama empat jam per hari dan berjumlah 30.300 orang;

4. Penghibur wanita, merupakan tenaga kerja di industri rekreasi dan berjumlah 89.600 orang;
5. Pekerja ilegal, merupakan tenaga kerja yang tidak terampil tanpa keterangan visa dan berjumlah lebih dari 300.000 orang.

Seperti negara berkembang lainnya, Indonesia menghadapi tingkat presentase pengangguran yang tinggi dan upah yang rendah. Di Jepang, meskipun ada permintaan besar akan tenaga kerja tidak terampil yang diciptakan oleh keengganan pekerja muda berkualifikasi tinggi untuk mengambil pekerjaan kerah biru, undang-undang imigrasi Jepang umumnya hanya mengizinkan masuknya tenaga kerja yang sangat terampil (Romdiati, 2003). Namun demikian, selama beberapa dekade terakhir, semakin banyak pekerja asing berketerampilan rendah dan tidak terampil telah memasuki Jepang dan bekerja baik secara legal maupun ilegal. Selama ledakan ekonomi Jepang tahun 1980-an, jumlah peserta pelatihan meningkat pesat, seperti halnya jumlah pekerja ilegal. Ekspansi ekonomi Jepang yang cepat pascaperang sejak Plaza September 1985 juga menuntut ketersediaan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Migrasi internasional yang terjadi sering dianggap sebagai bentuk ancaman bagi agama maupun identitas yang sudah melekat di masyarakat sehingga mengancam keamanan sosial suatu negara. Menurut Barry Buzan (1997) perlu adanya dekonstruksi identitas sehingga dapat mendorong keterbukaan dan penerimaan atas kehadiran budaya maupun identitas lainnya (Buzan, 1997). Selain itu, keberadaan pekerja migran juga dianggap dapat mengancam keamanan politik suatu negara. Kehadiran pekerja migran dapat mendukung terwujudnya modernisasi sebuah program kerja sama melalui legitimasi suatu negara yang mempengaruhi persepsi masyarakat sehingga dapat menunjang penyesuaian bagi pekerja migran untuk dapat diterima di suatu negara. Hal tersebut dapat melemahkan aturan, institusi, maupun norma yang menjadi dasar kedaulatan suatu negara demi menjaga hubungan baik dengan negara lain.

Jepang ingin mendorong individu asing untuk memiliki dedikasi yang tinggi sehingga dapat bekerja keras mendukung pembangunan di Jepang. Selain bekerja

keras, didukung juga oleh kejujuran individu sehingga kedua nilai tersebut sangat diutamakan demi membangun kepentingan bersama. Fenomena kedatangan pekerja asing ini dapat mendukung terciptanya kestabilan iklim bisnis di Jepang karena etos kerja yang mumpuni dan tingkat kedisiplinan yang tinggi. Hal tersebut mendorong pekerja asing untuk mencapai perekonomian yang stabil meskipun harus menderita yang berujung pada *karoshi* atau kematian karena *overwork* (Benedict, 2005). Kondisi tersebut menyebabkan persepsi pekerja asing terhadap Jepang yang merupakan negara dengan tingkat kesejahteraan pekerja asing yang rendah karena tuntutan falsafah hidup yang kuat di Jepang.

Sektor perekonomian yang kuat di Jepang didukung oleh budaya perusahaan sebagai keluarga atau *family corporate culture*. Hal tersebut didasari oleh tingginya tingkat loyalitas para pekerja terhadap kemajuan perusahaan. Loyalitas ini sendiri merupakan perumpamaan dari tradisi *samurai* yang selalu mengabdikan dirinya kepada *shogun* maupun *daimyo* atau tuan mereka. Budaya perusahaan tersebut juga menerapkan sistem ketenagakerjaan dalam jangka yang panjang sehingga para pekerja memiliki rasa memiliki yang tinggi kepada perusahaan untuk mendorong para pekerja memaksimalkan tingkat produktifitas perusahaan (Murakami, 1992). Perpindahan para pekerja ke perusahaan lain merupakan hal yang lazim terjadi namun dianggap tidak pantas di Jepang karena menantang budaya yang sudah melekat di masyarakat.

Dalam meningkatkan hubungan internasional antar negara dapat diukur berdasarkan upaya kerja sama yang terjalin. Kerja sama tersebut umumnya mengadopsi pendekatan yang berbeda-beda berdasarkan fokus tertentu. Tindakan kooperatif yang dilakukan oleh negara-negara dalam menjalin kerja sama dapat dituangkan melalui program. Konsep dari kerja sama memiliki dua elemen penting yakni aktor menyepakati kerja sama berdasarkan orientasi tujuan yang ingin dicapai dan keuntungan apa yang diperoleh oleh kedua negara dalam kerja sama tersebut (Milner, 1992). Selain itu, kerja sama juga digunakan untuk memperbaiki sesuatu tatanan

sehingga kerja sama merupakan sarana untuk mewujudkan harmonisasi hubungan antar negara dalam skala internasional.

Fokus yang dimaksudkan dalam pembangunan kerja sama ini dapat dilakukan dengan cara tawar-menawar. Salah satunya dapat dianalisa melalui kerja sama bilateral antara Jepang dan Indonesia. Kerja sama yang sudah terjalin dari tahun 1958 merupakan bentuk dari tawar-menawar kepentingan antar negara Indonesia dan Jepang (Puslit DPR, 2017). Bagi Indonesia, Jepang merupakan negara yang bergerak dalam sektor perdagangan yang strategis di dunia. Sedangkan menurut Jepang, Indonesia merupakan mitra yang cukup strategis dalam menjalin kerja sama di sektor keamanan dan pertahanan karena Indonesia kaya akan sumber daya manusia yang dapat dilatih untuk menjaga pertahanan kedua negara.

Terdapat 2 sektor pekerjaan yang tersedia bagi TKI di Jepang yakni sektor formal dan sektor informal. Dari 2 sektor tersebut proses penempatan TKI yang lebih diminati ialah sektor informal. Pada sektor informal ini, sistem pekerjaan yang dilakukan ialah pekerjaan yang bersifat perseorangan untuk UMKM yang kebanyakan tidak memiliki badan hukum. Pengiriman TKI ke Jepang lebih menguntungkan dibandingkan dengan ke negara lainnya dikarenakan kebutuhan TKI pada sektor informal dalam jumlah besar melalui program *Ginou Kenshusei*. Peluang peningkatan kebutuhan TKI pada sektor informal ini sangatlah luas karena TKI dapat ditempatkan pada 500 UMKM yang menjalankan bidang-bidang pekerjaan yang terfokus pada pertanian, perikanan, konstruksi, pengelolaan makanan serta minuman, manufaktur, mesin, pembuatan furniture, perhotelan, dan pengasuh orang tua (ITPC, 2014).

Hubungan yang terjalin antara Indonesia – Jepang sudah terjalin dari tahun 1958 yang berlandaskan pada perjanjian perdamaian antara pihak Indonesia dan Jepang di tahun tersebut, setelah tahun tersebut Indonesia – Jepang menjalin hubungan bilateral yang baik. Kerja sama antar kedua negara tersebut sudah berjalan dengan harmonis ditandai dengan kedatangan perdana menteri Jepang yakni Shinzo Abe ke Indonesia pada tahun 2017 (Raditya, 2017). Kedatangan tersebut berfokus untuk

membahas secara lebih lanjut mengenai investasi, perdagangan, maupun segi ekonomi antara Jepang – Indonesia.

Selain itu, hubungan Indonesia-Jepang ini ditandai dengan kontribusi Jepang dalam ODA yakni *Official Development Assistance* untuk mendukung pembangunan ke arah infrastruktur, industry, pertanian, kesehatan, dan juga pendidikan, juga Duta Besar Jepang untuk Indonesia mencatatkan bahwa sekitar 93,3% di perusahaan Jepang yang berada di Indonesia mempekerjakan para pekerja tanah air (Seniwati et al., 2021). Dalam menyikapi kerja sama bilateral yang terjalin ini, kedua negara sama-sama saling memperoleh keuntungan dimana Indonesia memperoleh barang-barang import berteknologi canggih dan dapat mengekspor barang-barang mentahnya ke Jepang. Selain itu, Jepang juga memperoleh sumber daya manusia yang dapat diarahkan salah satunya ke bidang militer demi menjaga keamanan di sektor darat, laut, maupun udara demi mempertahankan stabilitas kedua negara (Sani, 2021).

Keunikan kerja sama ketenagakerjaan yang terjalin antara Jepang-Indonesia pada sektor informal ialah penyaluran pekerja migran yang lebih cepat dibandingkan dengan pekerja sektor formal (Romdiati, 2003). Proses seleksi pada sektor formal menyebabkan penempatan pekerja migran ke Jepang menjadi lamban. Oleh karena itu, kehadiran pekerja informal memiliki kontribusi yang lebih dalam mempromosikan kerja sama internasional melalui kuantitas pekerja migran yang dikirimkan. Kehadiran pekerja informal ini juga merupakan solusi untuk mengatasi pertumbuhan pekerja ilegal ke Jepang karena proses penempatan yang lebih cepat untuk dilakukan. Pekerja informal lebih menguntungkan dibandingkan dengan kehadiran pekerja formal dikarenakan upah yang diterima tidak tergolong sebagai gaji sehingga sektor pekerjaan yang tergolong 3K yakni *kitanai*, *kitsu*, dan *kiken* dapat terpenuhi.

Kehadiran dari pekerja informal ini sebelumnya hanya diorientasikan pada UMKM di Jepang. TKI *Kenshusei* yang diberangkatkan melalui program *Ginou Kenshusei* ini merupakan SDM dengan usia antara 18-30 tahun berstatus lajang (Romdiati, 2003). UMKM minimal dapat mempekerjakan paling minimal 8 TKI

Kenshusei sedangkan pada sektor formal memiliki kapasitas yang terbatas karena umumnya hanya menerima pekerja ahli dan terampil yang telah melewati seleksi yang ketat (Romdiati, 2003). Di Jepang, produktifitas UMKM dapat mendorong transparansi ekspor yang lebih cepat dan kegiatan ekspor tersebut disalurkan melalui koordinasi dengan perusahaan besar. Keterbatasan SDM yang dimiliki oleh perusahaan besar menyebabkan adanya unsur ketergantungan sehingga UMKM merupakan mitra bagi perusahaan besar dalam memasok pengadaan baik barang dan jasa.

Hal yang melatarbelakangi Jepang dalam memberdayakan sumber daya manusia di Indonesia untuk bekerja di Jepang dikarenakan Jepang kekurangan tenaga kerja sebagai penggerak roda perekonomian Jepang. Faktor yang menjadi pemicu kekurangan tenaga kerja di Jepang ialah *aging population* sehingga kebanyakan populasi tenaga kerja di Jepang di dominasi oleh pekerja angkatan tua. Sulitnya regenerasi tenaga kerja di Jepang ini terbukti dari data kependudukan di tahun 2010 – 2015 sekitar 27% atau lebih dari 30 juta penduduk merupakan penduduk yang berumur 65 tahun keatas dan kemungkinan juga dapat meningkat di tahun 2050 sekitar 40% (Bryan Lufkin, 2018). Krisis sumber daya manusia di Jepang ini sangat berdampak pada sektor-sektor perekonomian terutama pada sektor pekerjaan dengan bayaran yang rendah sehingga dengan memanfaatkan kerja sama ketenagakerjaan yang terjalin pemerintahan dapat mengatasi krisis tersebut (Sayekti, 2016). Penyebab utama krisis sumber daya pada sektor perekonomian dapat terjadi karena kebanyakan calon tenaga kerja muda dari Jepang menolak untuk bekerja dengan upah yang rendah terutama pada sektor informal.

Implikasi jika sektor informal tidak ada ialah banyak industri UMKM yang menurun produktifitasnya karena keengganan pekerja muda Jepang untuk bekerja pada sektor informal, sementara perusahaan besar membutuhkan pasokan dari UMKM. Keberadaan dari sektor informal ini dimanfaatkan oleh UMKM untuk memiliki tenaga kerja murah. Penilaian masyarakat Jepang terhadap pekerja asing terkait posisi pekerjaan mereka yang rendah dan pendidikan mereka yang tidak tinggi (Kage et al.,

2021). Program *Ginou Kenshusei* ini memikat pekerja muda dari negara-negara berkembang seperti Indonesia dengan dalih pelatihan, pengembangan keterampilan, dan transfer teknologi (Siripala, 2018). Tetapi tuduhan eksploitasi, sedikit atau tidak ada pelatihan, dan kondisi seperti perbudakan telah merusak reputasi program. Jepang harus menyadari kenyataan pahit bahwa Ia membutuhkan tenaga kerja asing lebih dari tenaga kerja asing yang membutuhkan Jepang sehingga keberadaan sektor informal sangatlah penting.

Penyaluran tenaga kerja asing pada sektor informal ke Jepang memiliki dampak yang baik untuk mendorong pembangunan negara dan terlepas dari permasalahan geografi. Berdasarkan HDI atau *Human Development Indeks* pada tahun 2007 meninjau bahwa pembangunan negara berkembang kebanyakan memberdayakan pekerja kasar (Sugandi & Heryadi, 2018). Kehadiran dari pekerja migran ini nyatanya dapat mendukung pembangunan ekonomi suatu negara melalui sektor pekerja kasar, disamping itu juga kehadiran migran tidak terlepas dari perilaku kekerasan karena anggapan bahwa pekerja kasar merupakan pekerjaan kelas bawah. Dalam menangani hal tersebut, negara pengirim memerlukan aturan untuk melaksanakan perlindungan pekerja migran. Peraturan tersebut memuat mengenai penempatan negara tujuan bagi pekerja migran serta pemenuhan hak sebagai pekerja migran baik secara ekonomi, sosial, dan juga hukum.

Terjadinya migrasi secara internasional ke Jepang merupakan bentuk respon negara terhadap persaingan untuk menghadapi era globalisasi. Upaya untuk mengatasi masalah pekerja migran Indonesia baik legal maupun ilegal harus terkontrol dan dilindungi berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang harus diperjuangkan oleh negara Indonesia (Haryono, 2017). Pelaksanaan migrasi secara internasional merupakan sebuah tantangan bagi banyak negara termasuk Indonesia untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Dalam mendukung hal tersebut, Indonesia harus memperluas pemikirannya terkait permasalahan migrasi internasional yang terjadi dan mengancam

pekerja migran dari negaranya. Salah satu pemecahan permasalahan isu migrasi internasional dapat dilakukan dengan membangun kerja sama antar negara.

Secara umum, migrasi internasional dilakukan oleh negara berkembang ke negara maju dengan skala demografi yang rendah salah satunya Jepang. Berdasarkan proyeksi pemerintah Jepang, rendahnya tingkat demografi dapat mempengaruhi penyusutan angkatan kerja di Jepang kedepannya. Angkatan kerja diperkirakan akan menurun hingga tahun 2030 apabila tidak ada solusinya. Pada tahun 2030 nanti, partisipasi tenaga kerja akan menurun dan hal tersebut menjadi sebuah skenario yang negatif bagi produktifitas di Jepang (Ganelli & Miake, 2015). Hal tersebut dapat dicegah apabila pemerintah Jepang memanfaatkan jalur migrasi untuk menyediakan sumber daya manusia dalam menggerakkan perekonomian di Jepang.

Terdapat banyak asumsi mengapa migrasi internasional ini dapat terjadi salah satunya ialah kurangnya kapabilitas dari suatu negara untuk mengupayakan pembangunan ekonomi bagi rakyatnya. Berdasarkan data tahun 2017 dari *United Nations Report on International Migration* tercatat bahwa jumlah imigran terbesar yang tersebar di dunia berasal dari benua Asia yakni 42 juta jiwa (Alamari, 2020). Masih banyak imigran-imigran yang belum mengetahui bagaimana prosedural hukum yang harus dijalankan untuk menjadi imigran legal memunculkan imigran-imigran illegal tanpa pengawasan. Permasalahan imigran illegal ini dapat menjadi permasalahan keamanan dan dapat memicu tindakan-tindakan kejahatan lintas batas negara atau *transnational crime* karena telah melanggar batas teritorial di suatu negara tanpa izin yang resmi dan jelas karena ketidakterlibatan pemerintah di dalam migrasi internasional yang terjadi (Kristin & Dewi, 2017).

Kerja sama yang terjalin antara Jepang-Indonesia ini meliputi bidang-bidang yang lebih terperinci sehingga dapat menunjang pembangunan di Jepang. Kerja sama bilateral yang optimal dapat diukur berdasarkan bagaimana kapasitas dari campur tangan pemerintah negara atas kerja sama tersebut. Peranan pemerintah negara dalam menunjang kerja sama dapat dilihat melalui penyesuaian terkait kebijakan untuk

menunjang kepentingan masing-masing negara. Pelatihan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Jepang dapat dilakukan melalui pelaksanaan program magang ke Jepang. Melalui program magang ini diharapkan bahwa pekerja migran dapat memperoleh keterampilan sehingga program ini merupakan bentuk transfer ilmu melalui program pelatihan sumber daya manusia yang bagus untuk pengembangan pembangunan di negara asal.

Pada awalnya, Indonesia mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui jalur magang untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Pengiriman Pekerja Migran Indonesia diharapkan oleh pemerintahan daerah untuk meningkatkan standar kualitas berdasarkan keterampilan yang diperoleh selama di Jepang untuk menunjang pembangunan daerah (Pitoyo, 2016). Selain mengurangi pengangguran di Indonesia, pengiriman pekerja migran Indonesia melalui pada sektor informal ke Jepang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia sehingga memiliki kualitas.

Praktik penempatan pekerja migran ke Jepang pada sektor informal dengan skema B to C merupakan titik permasalahan dalam pengiriman pekerja migran karena banyaknya praktik yang menyimpang dan juga diskriminasi yang terjadi. Seiring berjalannya waktu, terdapat banyak masalah yang terjadi selama TKI yang berangkat di Jepang pada sektor informal. Faktor yang menyebabkan kedatangan TKI pada sektor informal ini disebabkan karena tingkat produktifitas UMKM yang cukup rendah. Sektor informal ini juga minim pengawasan sehingga penyampaian informasi yang tidak transparan mengenai kondisi dari pekerja migran sehingga kerap kali masih banyak pekerja migran yang bekerja diluar jam kerja (Prawira, 2011). Pemberangkatan yang dilakukan oleh pihak swasta ini menimbulkan masalah karena masih adanya pihak swasta abal-abal yang tidak menjamin perlindungan pekerja migran di Jepang.

Permasalahan yang terjadi pada kegiatan magang di Jepang menjadi salah satu faktor yang membentuk program *Tokutei Ginou*. Penyusunan kerja sama antara Jepang-Indonesia telah membentuk MoU berdasarkan hasil negosiasi yang telah dilakukan. Program *Tokutei Ginou* merupakan kerja sama antara Jepang dan Indonesia

yang saling menguntungkan Jepang maupun Indonesia. Program tersebut merupakan program kerja sama dengan kontrak 5 tahun bahkan bisa dilanjutkan tanpa batasan kontrak tahun dengan memperoleh gaji yang setara dengan standar di Jepang yang umumnya difasilitasi oleh lembaga pengirim maupun pribadi (SAMIT, 2020). Pentingnya keterampilan untuk menunjang keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bagi pemenuhan kebutuhan perusahaan besar. Dalam MoU ini menyatakan bahwa kedua negara melarang adanya intervensi antar negara sehingga mencegah penyebaran arus informasi yang bersifat rahasia (MOFA, 2019). Selain itu, Jepang juga menjamin keberlangsungan pekerja migran Indonesia yang bekerja melalui kontrol langsung ke perusahaan tempat migran Indonesia bekerja.

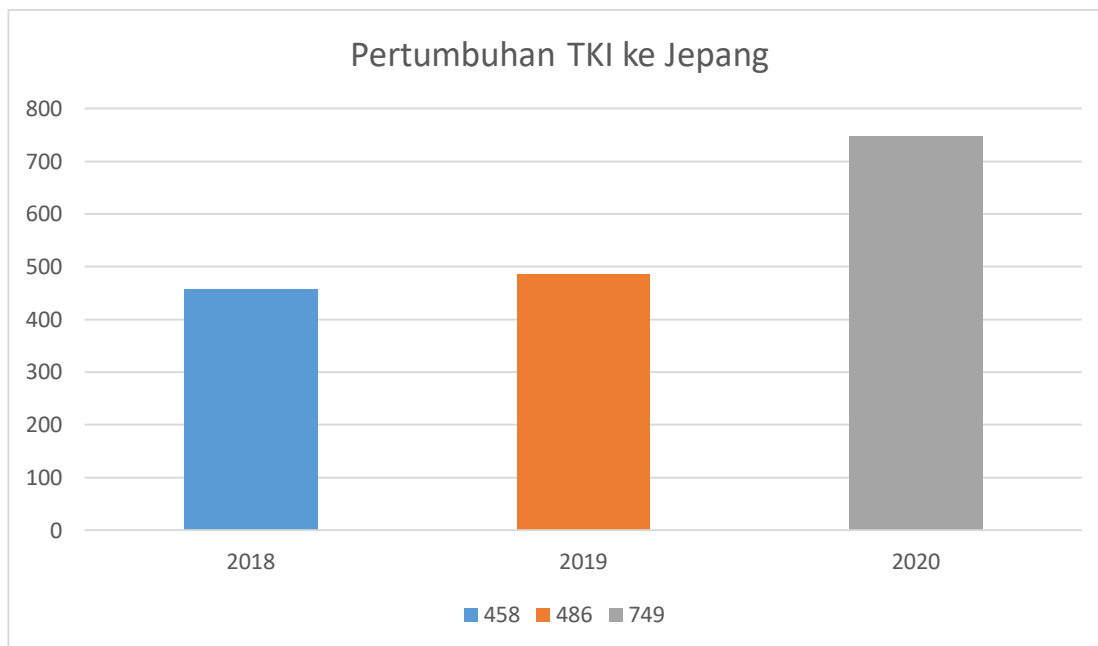
Menyikapi visa *Tokutei Ginou*, Indonesia turut bersaing dengan negara-negara lainnya dalam menghadapi persaingan penyaluran tenaga terampil ke Jepang. Apabila Indonesia dapat memanfaatkan potensinya dalam memberikan pelatihan calon pekerja migran maka Indonesia dapat mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan melalui tersedianya lapangan kerja yang mumpuni. Melalui persaingan yang kompetitif dapat membuktikan bagaimana kualitas dari Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan regionalnya termasuk melalui persaingan tenaga kerja yang terampil. Dalam memperoleh visa *Tokutei Ginou*, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara seperti Filipina, Kamboja, Nepal, Myanmar, Mongolia, Sri Lanka, Vietnam, Bangladesh, Uzbekistan, Pakistan, Thailand, dan India (Immigration Services Agency, 2019). Hal ini menciptakan persaingan secara internasional atas pekerja migran dalam segi pemahaman budaya dan kualitas untuk bekerja di Jepang.

Melalui program keterampilan khusus atau *Tokutei Ginou* pekerja migran dapat memperoleh visa untuk bekerja di Jepang secara resmi. Syarat yang wajib dipenuhi untuk memperoleh visa tersebut yakni harus lulus tes kemampuan bahasa Jepang melalui *Japanese Language Proficiency Test* atau JLPT dengan standar level N4 keatas atau *Japan Foundation Test* level A2. Pengetahuan tersebut untuk mengukur keterampilan berbahasa Jepang mengenai huruf *katakana*, *hiragana*, dan *kanji*

(Patrick, 2019). Standar selanjutnya ialah setiap calon pekerja migran harus lolos atau memiliki standar keterampilan berdasarkan bidang yang tersedia. Terdapat 14 sektor pekerjaan yang ditawarkan pada visa *Tokutei Ginou* yakni (Concierge Corporation, 2019):

1. Industri pembersihan dan perawatan gedung (bagian dalam gedung) atau *biru kurīningugyō*
2. Industri kesehatan atau *kaigogyō*
3. Industri peralatan dan suku cadang mesin atau *motogatazai sangyō*
4. Industri listrik atau *denki denshi jōhō kanren sangyō*
5. Industri pengoperasian mesin atau *sangyō kikai seizōgyō*
6. Industri kapal dan kelautan atau *zōsen hakuyō kōgyō*
7. Industri konstruksi seperti pengoperasian mesin pembangunan dan penggalian terowongan atau *kensetsugyō*
8. Industri bengkel dan perawatan kendaraan motor dan mobil atau *jidōsha seibigyō*
9. Industri penerbangan seperti tenaga kerja di bandara dan juga tenaga perawatan pesawat atau *kōkūgyō*
10. Industri akomodasi seperti resepsionis, pelayanan restoran, dan *customer service* atau *shukuhakugyō*
11. Industri perternakan dan pertanian atau *nōgyō*
12. Industri restoran atau *gaishokugyō*
13. Industri pengelolaan makanan dan minuman atau *inshokuryōhin seizōgyō*
14. Industri perikanan atau *gyogyō*.

Tabel I.1. Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Jepang



Sumber: (PUSLITFO, 2020)

Berdasarkan tabel I.1. di atas menjelaskan bahwa terjadinya peningkatan penerimaan pekerja migran Indonesia ke Jepang. Jepang merupakan negara maju yang mengincar pekerja migran asing untuk bekerja di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh karena Jepang sedang meningkatkan kerjasama bilateral dengan negara Indonesia untuk dapat merekrut banyak pekerja migran dalam 5 tahun kedepan (Puslit DPR, 2017). Pemerintah Jepang mengharapkan penerimaan pekerja migran yang datang ke negaranya dapat mendukung produktifitas dan memiliki etos kerja yang tinggi sesuai dengan standar Jepang.

Penulis menggunakan studi penelitian terkait dengan **Kerja sama Jepang dengan Indonesia** sebagai bahan rujukan bagi penulis. Hennings dan Mintz (2018) mengakui adanya peningkatan jumlah tenaga kerja asing di Jepang sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di berbagai industri (Hennings & Mintz, 2018). Kemudian Zhang (2020) mengemukakan bahwa studi kerja sama Jepang dengan Indonesia erat kaitannya dengan upaya Jepang dalam mempertahankan dinamika perekonomian negaranya meskipun tidak didukung oleh kondisi demografi

(Zhang, 2020). Pemerintah Jepang mengharapkan kebijakan migrasinya dapat menarik pekerja asing untuk bekerja di industri konstruksi, keperawatan, pekerja pabrik, dan perhotelan melalui terjalannya kerja sama ketenagakerjaan dengan Indonesia.

Hosogaya (2020) berpendapat bahwa diperlukannya peranan dari pemerintah Jepang untuk mengatur implementasi dari keberadaan pekerja migran asing sehingga dapat menunjang kerja sama Jepang dengan Indonesia (Hosogaya, 2020). Kebijakan arus migrasi Jepang harus lebih ditekankan sehingga dapat mengantisipasi *Migration Backdoor* yakni tenaga kerja asing ilegal yang masuk ke Jepang dengan memalsukan dokumen. Ukhtiyani & Indartono (2020) mengemukakan pendapatnya terkait dengan kerja sama Jepang dengan Indonesia bahwa keberlangsungan dari kerja sama ini harus mendorong peningkatan *front direct investment* atau FDI bagi Indonesia (Ukhtiyani & Indartono, 2020). Namun kenyataannya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui kerja sama tersebut tidak memberikan peningkatan secara signifikan karena pendapatan yang diperoleh oleh pekerja migran Indonesia kebanyakan digunakan untuk keperluan konsumsi sehari-hari.

Dalam meneliti mengenai program *Tokutei Ginou*, penulis menggunakan hasil dari penelitian sebelumnya sebagai bahan rujukan pembahasan yang dikaji. Hayakawa (2019) menafsirkan bahwa perkembangan yang lebih dinamis terjadi di Jepang dikarenakan sistem ketenagakerjaan proaktif yang diserap dari beragam warga negara asing dengan kualitas yang tinggi untuk mempertahankan dan memperkuat daya saing perekonomian Jepang secara internasional (Hayakawa, 2019). Bachri dkk (2020) menyatakan juga bahwa melalui program *Tokutei Ginou* calon pekerja migran dengan spesialisasi perawat yang dikirim ke Jepang dapat memenuhi kebutuhan perawat untuk merawat golongan lanjut usia dengan standar dan mutu yang berkualitas (Bachri et al., 2020). Lebih lanjutnya lagi, kompetensi yang dicapai oleh calon pekerja migran perawat menentukan kualitas dari pihak penyelenggara sehingga bahan ajar dan pembelajaran yang mutakhir menjadi nilai yang penting.

Selain itu, studi mengenai program *Tokutei Ginou* menurut Okubo (2021) menjadi hal yang fundamental karena individu mulai memberikan pandangan terkait efektifitas program tersebut (Okubo, 2021). Keberadaan pekerja migran tidak mengganggu sosialisasi masyarakat asli Jepang yang berada di kalangan atas sehingga masyarakat kelas atas cenderung tidak memiliki kendala terkait keragaman yang ada. Dibalik itu semua, program *Tokutei Ginou* menurut studi Takahashi (2021) memicu islamophobia di tengah masyarakat Jepang sehingga menimbulkan permasalahan (Takahashi, 2021). Pandangan skeptis tersebut dipengaruhi oleh sejarah yang terjadi di Jepang sehingga cara pandang masyarakat asli Jepang menilai Islam sebagai kepercayaan yang dapat merusak budaya di Jepang. Kebanggaan negara Jepang terhadap homogenitasnya serta tingginya nilai kebudayaan dalam tatanan sosial menganggap Islam sebagai bentuk ancaman karena penduduk Islam dianggap individu yang barbar dan malas sehingga memunculkan gagasan bahwa Islam merupakan agama yang terbelakang (Takahashi, 2021).

Kurang dihargainya Islam di Jepang sangat berbeda dengan Kristenisasi yang masuk ke Jepang karena Kristenisasi dianggap berasal dari Eropa sehingga memiliki nilai-nilai dari barat yang dianggap bebas akan perselisihan, konflik, maupun terorisme (Takahashi, 2021). *Tokutei Ginou* merupakan program kerja sama ketenagakerjaan dengan negara-negara dengan mayoritas Islam seperti Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Malaysia, Iran, dan Turki. Populasi Islam di Jepang juga semakin meningkat namun perkembangan agama Islam di Jepang masih dikatakan tidak jelas karena sebagian besar artikel atau buku yang beredar di Jepang hanya membahas mengenai keberadaan Muslim asing yang tinggal di Jepang. Berbeda halnya dengan penduduk muslim asli di Jepang yang tidak disorot sama sekali karena dianggap sebagai bentuk penghinaan yang mengancam eksistensi budaya asli Jepang.

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi dari literatur terdahulu yang membahas topik serupa mengenai kerja sama Jepang-Indonesia di bidang ketenagakerjaan. Dalam melakukan sebuah penelitian, kajian literatur

merupakan sumber hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya. Kajian literatur ini juga menggunakan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis mengenai program *Tokutei Ginou*. Topik yang diangkat dalam literatur ini merupakan topik yang berkesinambungan dengan permasalahan penelitian penulis. Referensi yang dipakai dalam literatur ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi penulis mengenai masalah yang dibahas oleh peneliti sebelumnya.

Menurut Hasibuan dan Nurjanah (2013) Literatur Review ini berisi mengenai temuan dari Peneliti sebelumnya yang dijadikan sebagai bahan penelitian sehingga menjadi landasan untuk menjalankan pelaksanaan penelitian secara lebih mendalam.

Literatur pertama ditulis oleh Muhamad Afghany Haryatno mahasiswa Universitas Islam Indonesia. literatur ini mengangkat topik “**Penerapan Kebijakan New Foreign-Worker Visas di Tengah Isu Diskriminasi Terhadap Pekerja Asing di Jepang**”. Kasus yang dibahas ialah visa *Tokutei Ginou* sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan diskriminasi TKI di Jepang. Kondisi TKI pada sektor informal cukup memprihatinkan di mana kondisi dari program *Ginou Kenshusei* sehingga peranan lembaga yang sangat minim menyebabkan banyak permasalahan yang merenggut kesejahteraan TKI.

Pada literatur tersebut Penulis menemukan bahwa kasus diskriminasi yang dialami oleh TKI di Jepang pada sektor informal disebabkan karena campur tangan dari lembaga dan pemerintah Jepang yang terbatas. Pemerintah Jepang telah mendukung TKI sehingga mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Jepang karena orientasi dari TKI yang lebih memprioritaskan untuk mendapatkan gaji bukan pengalaman.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong terbentuknya visa *Tokutei Ginou* yakni:

1. Terbatasnya waktu untuk mempersiapkan Tokyo Olympic 2020
2. Jepang membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar untuk mendorong revitalisasi ekonomi

3. Diskriminasi yang terjadi pada sektor informal menjadi pemicu pertumbuhan TKI ilegal sehingga merusak reputasi program *Ginou Kenshusei*.

Literatur pertama ini lebih mengangkat pembahasan terkait dengan penanganan permasalahan diskriminasi yang menyebabkan banyak TKI magang memilih untuk kabur dari Jepang dan beralih menjadi pekerja ilegal. Dijelaskan juga pada literatur pertama ini bahwa teori yang digunakan pada penelitian ini ialah model Inkrementalis sebagai evaluasi dalam menerapkan solusi sebagai langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Keterbatasan kemampuan dari TKI *Ginou Kenshusei* menjadi pembahasan utama yang dapat digunakan oleh Penulis sebagai acuan untuk memperdalam Implementasi dari program *Tokutei Ginou* yang belum dibahas secara lebih mendalam dan literatur ini dijadikan sebagai pembandingan.

Literatur kedua ditulis oleh Arianty Vasiaty mahasiswi Universitas Al Azhar Indonesia. Literatur ini mengangkat topik yang berjudul “**Unsur Budaya dalam Komunikasi Berbahasa Jepang di Dunia Korporasi Indonesia di Indonesia: Kajian Konflik Interkultural**”. Kasus yang dibahas ialah terdapat kategori visa bekerja di Jepang terbaru yakni Specified Skilled Worker atau *Tokutei Ginou* sebagai solusi untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Jepang serta pemahaman atas budaya di Jepang yang terbatas.

Pada literatur tersebut Penulis menemukan bahwa pemahaman bahasa dan budaya Jepang yang rentan terhadap permasalahan. Kurangnya pemahaman TKI pada sektor informal di Jepang sehingga komunikasi secara interkultural tidak dapat terbangun. Penggambaran dari interkultural ini menyiratkan bahwa ketidakpahaman atas budaya di Jepang yang menyebabkan penggunaan ungkapan atau ekspresi yang tidak dapat diterima di Jepang.

Keberadaan dari visa *Tokutei Ginou* ini dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada sektor informal dalam 5 kategori yakni:

1. Mengenai sentuhan secara fisik di Jepang

2. Sikap TKI ketika menerima kritik
3. Budaya Jepang yang menghargai waktu
4. Pemahaman kata-kata yang memiliki makna yang luas
5. Budaya *Kaizen* yang menjadi tolak ukur untuk bekerja.

Literatur kedua ini lebih mengangkat mengenai penyesuaian budaya dan cara berkomunikasi sangatlah penting di Jepang. Program *Ginou Kenshusei* ini tidak dapat memberikan pemenuhan atas hal-hal tersebut sehingga dengan keberadaan dari program *Tokutei Ginou* ini keberadaan TKI dapat dipandang secara lebih layak di Jepang. Fokus permasalahan yang tidak diteliti secara lebih mendalam sehingga literatur kedua ini belum meneliti secara komprehensif mengenai pelaksanaan dari program *Tokutei Ginou* secara komprehensif sehingga literatur kedua ini cocok untuk dijadikan sebagai literatur pembandingan.

Literatur ketiga ditulis oleh Deborah J. Milly sebagai peneliti yang menulis artikel pada Migration Policy Institute. Literatur ini mengangkat topik mengenai “**Japan’s Labor Migration Reforms: Breaking with the Past?**”. Kasus yang dibahas ialah terletak pada kebutuhan Jepang untuk mendatangkan 345.150 pekerja migran dengan keterampilan yang spesifik pada usia produktif untuk mengatasi permasalahan *aging population*.

Penulis menemukan bahwa pada literatur ketiga ini menjelaskan Jepang menyambut perubahan sehingga Jepang tidak dikenal sebagai negara homogen melainkan bertransformasi menjadi negara heterogen. Fokus utama pada artikel tersebut berupaya menjelaskan bahwa visa *Tokutei Ginou* ini sebagai upaya untuk menangani kebutuhan atas SDM tanpa penyelesaian jangka panjang dan keberadaan dari program *Tokutei Ginou* ini dapat menggantikan program *Ginou Kenshusei* yang rentan terhadap praktik-praktik menyimpang. Perubahan yang diperkenalkan untuk menanggapi permintaan seputar bisnis pada perusahaan besar di Jepang.

Program *Tokutei Ginou* ini dikhususkan untuk TKI dengan keterampilan menengah. Visa tersebut terbagi atas dua kategori yang memungkinkan untuk

menerima TKI dengan status residensi secara permanen. Permintaan tenaga kerja dengan keterampilan menengah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam mempersiapkan Tokyo Olympic 2020. Penciptaan visa terbaru ini bertujuan untuk menyetarakan pekerja migran dengan pekerja lokal melalui implementasi pada visa kategori pertama dan kategori kedua. Di mana pada visa kategori pertama ini menetapkan status residensi sampai lima tahun dan visa kategori kedua ini menetapkan status residensi yang dapat diperpanjang secara permanen. Literatur ketiga ini dijadikan sebagai Penulis sebagai acuan utama dari implementasi *Tokutei Ginou* sehingga Penulis dapat membahas permasalahan yang terjadi secara lebih mendalam. Tetapi literatur ketiga ini memiliki perbedaan dengan pembahasan yang diangkat oleh Penulis sehingga sudut pandang yang berbeda tersebut dapat menyimpulkan bahwa ketenagakerjaan pada sektor informal masih menemukan permasalahan yang sama.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya terdapat cela bagi penulis untuk melihat **Implementasi Kerja Sama Ketenagakerjaan Jepang-Indonesia Terkait Pekerja Migran Berketerampilan Spesifik**

I.2. Rumusan Masalah

Bagi Jepang, permasalahan demografi dapat menghambat tingkat produktifitas negara. Hal tersebut dikarenakan tidak tersedianya jumlah tenaga kerja yang mumpuni yang tidak sebanding dengan tersedianya lapangan pekerjaan. pemerintah Jepang memerlukan solusi untuk mengatasi permasalahan demografi ini sehingga upaya migrasi internasional merupakan salah satu caranya. Program ini dirancang oleh pemerintah kedua negara untuk menyediakan sumber daya manusia berkualitas dari Indonesia yang dapat ditempatkan pada perusahaan swasta di Jepang. Terciptanya kerja sama melalui program *Tokutei Ginou* untuk memperoleh visa dengan kontrak lima tahun sebagai izin untuk bekerja di Jepang dengan spesialisasi yang dipilih. Hal tersebut juga dikontrol oleh pemerintah Indonesia maupun Jepang dalam pengoperasiannya sehingga keamanan dan kenyamanan pekerja migran dapat diprioritaskan.

Melalui hubungan diplomasi yang baik antara Jepang-Indonesia terkait pembukaan jalur migrasi untuk bekerja di Jepang dapat menjadi solusi untuk mengurangi permasalahan pengangguran di tanah air (Dewi, 2013). Dalam kondisi ini, baik dari Indonesia maupun dari pihak Jepang menyambut kerja sama terkait ketenakerjaan ini dengan baik. Pemerintah Indonesia menginginkan lapangan kerja seluas-luasnya untuk meminimalisir pengangguran, sedangkan Pemerintah Jepang juga membutuhkan tenaga kerja karena negaranya tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup. Tidak cukupnya tenaga kerja yang subur di Jepang disebabkan karena angka kelahiran di Jepang yang cenderung sedikit tidak sebanding dengan angka harapan hidup penduduknya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan bahwa masalah yang dapat dijadikan pertanyaan penelitian ialah sebagai berikut: **Bagaimanana Implementasi Kerja Sama Bilateral Indonesia Terhadap Jepang Dalam Mendorong Pertumbuhan Pekerja Migran Indonesia Melalui Program Tokutei Ginou?**

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan juga rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Praktis, dapat memberikan gambaran mengenai implementasi kerja sama Jepang-Indonesia ketenagakerjaan terkait pekerja migran Indonesia berketerampilan spesifik dalam menjamin kesetaraan hak dan kewajiban pekerja migran Indonesia di Jepang. Pemerintah maupun organisasi pengirim harus saling berintegrasi sehingga permasalahan yang terjadi pada pekerja migran Indonesia dapat diatasi.
2. Tujuan Teoritis, dapat menjelaskan mengenai upaya pemerintah Jepang-Indonesia dalam mengatasi diskriminasi yang dialami oleh pekerja migran Indonesia selama bekerja di Jepang dengan program *Kenshusei* melalui pelaksanaan dari program *Tokutei Ginou*. Berdasarkan hal tersebut terdapat kelemahan teori sehingga menjadi kontribusi Penulis dalam mengkaji

Implementasi dari program *Tokutei Ginou* sehingga kondisi kerja sama telah mengutamakan kepuasan dari kedua negara secara deviden.

I.4. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang dapat diperoleh dalam hasil penelitian ini:

1. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memberikan informasi terkait manfaat dari program *Tokutei Ginou* dalam meningkatkan upaya kerja sama antara Jepang-Indonesia pada sektor informal yang telah menjamin keberlangsungan pekerja migran Indonesia secara kesejahteraan dan memastikan bahwa kedua negara tidak dapat saling berkhianat. Sebaliknya, Jepang juga dapat menerima pekerja migran berkualitas serta meningkatkan kuantitas sumber daya manusia untuk bekerja di Jepang yang memiliki keterampilan.
2. Manfaat akademis, penulis mengembangkan, menganalisis, dan mengeksplorasi permasalahan yang diteliti sehingga dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti permasalahan serupa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu hubungan internasional mengenai manfaat yang didapatkan oleh negara pengirim pekerja migran maupun negara penerima pekerja migran. Hasil dari penelitian ini kedepannya diharapkan dapat memperluas wawasan pembaca terkait upaya untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja migran dan perusahaan melalui implementasi kerja sama Jepang-Indonesia.

I.5. Sistematika Penulisan

Pada sub-bab ini, penulis menggambarkan alur pemikiran yang ditulis ke dalam hasil penelitian. Penelitian ini terdiri dari beberapa bab dan sub-bab yang ditulis berdasarkan sistematika penulisan yang termuat seperti berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang diteliti penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Latar belakang masalah dalam bab ini menjelaskan mengenai masalah sehingga mencerminkan adanya perbedaan atas *das sein-das solen* terkait fenomena yang diteliti. Bagian ini juga menggambarkan klasterisasi dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu sehingga dapat memastikan bahwa penelitian yang dilakukan penulis berbeda. Rumusan masalah menggambarkan mengenai masalah penelitian yang akan dicari jawabannya melalui proses maupun pengumpulan data hasil penelitian. Tujuan penelitian merupakan hasil yang akan diperoleh setelah penelitian dilakukan berdasarkan tujuan praktis maupun tujuan teoritis. Manfaat penelitian merupakan kontribusi dari hasil penelitian yang akan dirasakan langsung berdasarkan tujuan penelitian. Sistematika penulisan merupakan gambaran umum atas keterkaitan isi dengan pembahasan yang termuat dalam setiap bab pada skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari dua sub-bab penelitian yaitu konsep dan teori penelitian serta kerangka pemikiran. Konsep dan teori penelitian dasar yang digunakan penulis dalam menganalisa fenomena penelitian yang dilakukan. Konsep dan teori yang digunakan oleh penulis berdasarkan dengan Ilmu Hubungan Internasional yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Kerangka pemikiran merupakan gambaran umum dari rumusan masalah yang dijadikan penulis sebagai alur dalam menjalankan penelitian hingga menemukan hasil penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan tabel rencana waktu. Bab ini merupakan instrumen penelitian yang akan diterapkan oleh penulis dalam mendukung penemuan hasil penelitian.

BAB IV: KERJA SAMA KETENAGAKERJAAN JEPANG-INDONESIA TAHUN 2017-2021

Bab ini membahas mengenai dinamika dari kerja sama yang terjalin antara Jepang-Indonesia pada sistem *Kenshusei* dan *Jisshusei*. Penulis juga menguraikan mengenai kebutuhan Jepang atas pekerja terampil di Jepang yang ditempatkan melalui program

Tokutei Ginou. Selama keberlangsungan dari program *Tokutei Ginou* ini, Penulis juga menjelaskan mengenai keterlibatan dari pihak-pihak Jepang dalam mendukung pengelolaan migran melalui MoJ, pengawasan Pekerja Migran Indonesia melalui Biro Migrasi, pengurusan kontrak kerja serta registrasi Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja sebagai tenaga terampil di Jepang, dan pemenuhan kebutuhan secara keseluruhan selama hidup di Jepang melalui RSO.

BAB V: IMPLEMENTASI KERJA SAMA KETENAGAKERJAAN JEPANG-INDONESIA PERIODE 2017-2021

Bab ini membahas mengenai kontribusi pihak-pihak Indonesia selama keberlangsungan dari program *Tokutei Ginou*. Keterlibatan dari Kemnaker, BP2MI, dan LPK yang memiliki izin SO untuk berkoordinasi terhadap pihak Jepang untuk mengetahui kondisi Pekerja Migran Indonesia di Jepang. Penulis juga menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi dan dialami oleh pihak-pihak tersebut pelaksanaan dari kerja sama tersebut, sosialisasi program *Tokutei Ginou* kepada seluruh masyarakat di Indonesia, pelatihan masyarakat yang mendaftar menjadi CPMI, dan kontrol Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sebagai tenaga terampil di Jepang. Bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian yang berhubungan dengan teori-teori yang telah ditentukan dan hasil analisa tersebut telah diperkuat dengan hasil wawancara dari pihak-pihak perwakilan masing-masing instansi yang terlibat. Narasumber yang dipilih oleh Penulis memiliki kapabilitas atas permasalahan yang diteliti oleh Penulis sehingga dapat memperluas temuan data berdasarkan teori dan diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang diteliti.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini memuat mengenai keseluruhan analisis yang dibahas oleh penulis pada bab IV-V sehingga dapat ditarik gambaran besar dari kondisi kerja sama pada program *Tokutei Ginou* yang telah terjalin antara Jepang-Indonesia. Penulis juga telah merangkum permasalahan yang terjadi pada program *Tokutei Ginou* melalui saran yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu Hubungan Internasional.

DAFTAR PUSTAKA